



ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS PADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) SUB DIVISI REGIONAL BAUBAU

¹ Astria Putri Ning Hidayah, ² Ishak Awaluddin, ³ Fitriaman

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Universitas Halu Oleo

email: astriagmt@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the accounting system used in the process of rice procurement and distribution at Perum BULOG Sub Divre Baubau, as well as to evaluate the effectiveness of its implementation in practice. The research method applied is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the accounting system for rice procurement through Mitra Kerja and the distribution system through Rumah Pangan Kita (RPK) have been carried out in accordance with Perum BULOG's standard operating procedures (SOP). However, there are still some manual stages, so the procurement and distribution processes are not yet fully optimal. This study recommends improvements to the workflow by using existing documents, such as the Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) and Nota Timbang, to automatically trigger the payment process in order to increase efficiency and transparency. It also suggests a one-step submission and ordering system to speed up the delivery of goods. These recommendations are expected to enhance the efficiency, effectiveness, and accountability in managing rice at Perum BULOG Sub Divre Baubau.

Keyword: Accounting System, Rice Procurement, Rice Distribution, Bulog.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem akuntansi yang digunakan dalam proses pengadaan dan pendistribusian beras pada Perum BULOG Sub Divre Baubau, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengadaan beras melalui Mitra Kerja dan sistem pendistribusian melalui Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) telah dijalankan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) Perum BULOG. Namun, saat ini masih memiliki beberapa tahapan manual sehingga proses pengadaan dan pendistribusian belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan alur kerja dengan memanfaatkan dokumen yang sudah ada, seperti Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang, untuk secara otomatis memicu proses pembayaran guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Serta sistem pengajuan dan pemesanan satu langkah guna mempercepat penyaluran barang. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan beras di Perum BULOG Sub Divre Baubau.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Pengadaan Beras, Pendistribusian Beras, Bulog.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, sektor pertanian Indonesia memegang peranan strategis dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Beras merupakan bahan pangan pokok utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Konsumsi beras per kapita di tanah air tergolong tinggi, sehingga stabilitas produksi dan distribusinya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan negara.

Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah, namun ketergantungan terhadap impor komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, gula, dan gandum masih menjadi masalah serius. Fakta bahwa negara agraris ini masih harus mengimpor beberapa bahan pangan penting untuk memenuhi kebutuhan domestik menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam dan kemampuan produksi dalam negeri (Herliana et al., 2025). Ketergantungan ini tidak hanya mengancam kedaulatan pangan, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar global.

Kerentanan ekonomi akibat ketergantungan impor berdampak langsung pada masyarakat. Ketika terjadi lonjakan harga di pasar internasional atau gangguan pasokan global, Indonesia menghadapi risiko kenaikan harga pangan yang dapat memicu inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, ketergantungan ini melemahkan posisi petani lokal yang kurang mendapat dukungan kebijakan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing mereka (Adietya et al., 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui pemberdayaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Sebagai badan usaha milik negara yang memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan, BULOG dipercaya pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai penyangga harga, pengendali distribusi, serta penyedia logistik pangan terutama beras (Hidayat & Evitha, 2021). BULOG tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan ketersediaan beras tetap terjaga secara merata di seluruh wilayah dengan harga stabil dan terjangkau (Efrita et al., 2017).

Untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif hingga ke daerah-daerah, BULOG membentuk unit pelaksana teknis di tingkat wilayah, yaitu Divisi Regional (Divre) dan Sub Divisi Regional (Sub Divre). Salah satu unit yang menjalankan fungsi penting adalah Sub Divre Baubau, yang bertanggung jawab atas pengelolaan logistik pangan di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara (Sam et al., 2023). Sub Divre Baubau melaksanakan kegiatan mulai dari pengadaan beras dari petani lokal, penyimpanan dalam gudang, hingga pendistribusian ke pasar atau program bantuan pemerintah.

Wilayah kerja Sub Divre Baubau mencakup Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, dan sekitarnya. Karakteristik wilayah ini terdiri dari daratan dan kepulauan sehingga menghadirkan tantangan logistik yang cukup kompleks terutama dalam hal transportasi antar pulau dan ketersediaan infrastruktur jalan. Dalam pelaksanaan pengadaan beras, Sub Divre Baubau menggunakan dua jalur utama. Pertama, melalui Mitra Kerja yang melibatkan perusahaan penggilingan atau kelompok tani berdasarkan kontrak pengadaan. Kedua, melalui Satgas Pengadaan internal BULOG yang membeli beras langsung dari petani sesuai harga pokok pembelian.

Setelah beras tersedia di gudang, pendistribusian dilakukan melalui dua saluran. Saluran pertama lewat Mitra RPK (Rumah Pangan Kita), yaitu jaringan kios atau warung binaan BULOG. Saluran kedua lewat jalur komersil yang menysasar pasar umum serta pedagang tradisional (Hidayat, 2019). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, proses tidak hanya berhenti pada aspek fisik logistik. Aktivitas administrasi dan akuntansi juga menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi dan akuntabilitas organisasi.

Sistem akuntansi berfungsi mencatat seluruh transaksi dalam pengadaan dan distribusi beras, sekaligus menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pengendalian internal (Geerts, 2011). Lebih dari sekadar alat pencatatan, sistem akuntansi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian intern dan pengambilan keputusan. Dengan sistem akuntansi yang baik, semua aktivitas dapat terekam secara kronologis dan logis sehingga memudahkan pelacakan serta audit (Waluyo, 2019).

Dalam konteks Perum BULOG, keberadaan sistem akuntansi menjadi lebih krusial. Perusahaan ini mengelola barang milik negara dan menyalurkan bantuan pangan yang sangat sensitif terhadap isu transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, setiap unit kerja termasuk Sub Divre Baubau dituntut menerapkan sistem akuntansi yang sesuai standar dan mampu mengontrol setiap alur barang dan uang secara efektif.

Keberhasilan implementasi sistem akuntansi tidak terlepas dari struktur organisasi dan kondisi sumber daya manusia. Idealnya, setiap bagian yang terlibat dalam pengadaan dan distribusi memiliki tugas yang jelas serta dilakukan oleh personel berbeda guna menciptakan pemisahan fungsi yang sehat. Ketika sumber daya manusia terbatas atau terdapat rangkap jabatan, risiko kesalahan, ketidaktepatan pelaporan, hingga penyimpangan meningkat signifikan.

Kendala struktural seperti ini ditemukan di Sub Divre Baubau. Berdasarkan standar organisasi, bagian operasional idealnya ditangani oleh empat seksi dengan peran berbeda, yaitu Seksi Pengolahan, Seksi Pergudangan Persediaan

dan Angkutan, Seksi Perawatan dan Pengendalian Mutu, serta Seksi Pelayanan Publik. Namun, di Sub Divre Baubau seluruh tanggung jawab tersebut hanya ditangani oleh satu orang. Beban kerja menjadi sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko dari segi efisiensi, akurasi data, maupun tata kelola internal (Sam et al., 2023).

Permasalahan serupa juga ditemukan di unit BULOG lain. Fitriyah dan Pertiwi (2020) mengungkapkan kendala dalam sistem informasi akuntansi penjualan pada BULOG Sub Divre Kediri yang berdampak pada efektivitas pengendalian intern. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan sistem akuntansi bukan kasus terisolasi, melainkan perlu diatasi secara menyeluruh di seluruh jaringan operasional BULOG.

Mengingat kompleksitas proses pengadaan dan pendistribusian beras serta kendala struktural di Sub Divre Baubau, diperlukan alat bantu analisis yang mampu memetakan bagaimana sistem tersebut berjalan di lapangan. Flowchart atau bagan alir merupakan representasi grafis dari suatu sistem yang menggambarkan alur kerja, urutan kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, serta hubungan antarbagian (Geerts, 2011). Dengan visualisasi alur pengadaan dan pendistribusian beras, akan lebih mudah mengidentifikasi prosedur yang tidak efisien, titik-titik rawan kesalahan, atau potensi duplikasi fungsi.

Selain itu, flowchart bermanfaat untuk mengukur sejauh mana sistem akuntansi yang ada di Sub Divre Baubau telah dijalankan sesuai standar prosedur operasional pusat. Apabila terdapat penyimpangan, flowchart membantu mengilustrasikan celah tersebut secara jelas dan logis. Hal ini penting dalam rangka menyusun rekomendasi perbaikan dari segi struktur organisasi, pembagian tugas, maupun sistem pencatatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi yang diterapkan oleh Perum BULOG Sub Divre Baubau dalam pengadaan dan pendistribusian beras, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan beras oleh BULOG.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Sistem dan Sistem Akuntansi

Sistem merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar pemahaman dalam berbagai bidang ilmu, termasuk akuntansi. Menurut Simatupang (1995), sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai

tujuan tertentu. Pamudji (1987) menegaskan bahwa sistem merupakan upaya organisasi di mana para pegawai diberikan tugas masing-masing agar dapat bekerja sama mewujudkan tujuan yang diharapkan. Kusdi (2013) menambahkan perspektif strategis dengan menyatakan bahwa sistem sangat memengaruhi penyusunan strategi dan desain dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, sistem merupakan satu kesatuan di mana bagian-bagian saling berinteraksi secara terpadu untuk mendukung pencapaian tujuan bersama dalam organisasi.

Sistem akuntansi merupakan penerapan konsep sistem dalam pengelolaan informasi keuangan. Suryanto (2022) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah serangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, serta melaporkan transaksi keuangan organisasi. Sistem ini mencakup kebijakan akuntansi, dokumentasi transaksi, pencatatan dalam buku besar, dan penyusunan laporan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal. Romney dan Steinbart (2020) mengelompokkan sistem akuntansi menjadi dua kategori, yaitu sistem manual yang bergantung pada pencatatan konvensional dan sistem berbasis komputer yang memanfaatkan perangkat lunak untuk mempercepat pemrosesan data. Kedua sistem memiliki keunggulan masing-masing yang bergantung pada kompleksitas organisasi serta kebutuhan efisiensi dan akurasi. Sitingak (2020) menambahkan bahwa sistem akuntansi berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan guna memastikan rencana berjalan baik. Dengan demikian, sistem akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi tetapi juga pada pengendalian internal yang efektif.

Tujuan dan Prinsip Sistem Akuntansi

Tujuan utama sistem akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat bagi pemangku kepentingan. Warren, Reeve, dan Duchac (2020) menegaskan bahwa informasi keuangan harus mencerminkan kondisi perusahaan secara jelas, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas, sehingga manajemen mampu merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara efektif. Soemarso dan Sri Mulyani (2018) menekankan bahwa sistem akuntansi mendukung pengendalian internal untuk memastikan setiap transaksi dicatat sesuai prosedur, sekaligus mengidentifikasi kesalahan atau potensi penipuan guna menjaga integritas pelaporan keuangan. PPM School of Management (2023) menambahkan bahwa sistem akuntansi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan melalui pencatatan dan pelaporan transaksi yang tepat waktu sesuai regulasi berlaku.

Secara khusus, Mulyadi (2021) merangkum prinsip-prinsip dasar sistem akuntansi. Prinsip kewajaran menuntut objektivitas laporan keuangan tanpa manipulasi. Prinsip ketepatan waktu menekankan relevansi informasi bagi pengambilan keputusan. Prinsip konsistensi menjaga daya banding laporan antarperiode, sedangkan prinsip kelengkapan mewajibkan pencatatan seluruh transaksi relevan. Prinsip akuntansi berterima umum (GAAP) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi yang diterima secara luas oleh regulator maupun investor. Prinsip pemisahan entitas memastikan transaksi bisnis tercatat terpisah dari transaksi pribadi pemilik. Prinsip pengakuan pendapatan mengatur kapan pendapatan dilaporkan dalam laporan keuangan, yaitu ketika transfer hak kepemilikan telah terjadi dan jaminan pembayaran diterima.

Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbart (2020) mengidentifikasi enam komponen utama sistem informasi akuntansi. Komponen pertama adalah orang, meliputi akuntan, manajer, auditor, dan staf administrasi yang berperan dalam pengoperasian serta pemanfaatan sistem. Komponen kedua berupa prosedur dan instruksi yang mencakup langkah-langkah manual maupun otomatis untuk mengumpulkan, memverifikasi, memproses, dan menyimpan data transaksi sehingga keakuratan terjamin. Komponen ketiga adalah data, yaitu input mentah berupa transaksi dan data referensi organisasi seperti faktur serta bukti penerimaan. Komponen keempat mencakup perangkat lunak yang mengolah data menjadi laporan keuangan dan analisis pendukung keputusan. Komponen kelima adalah infrastruktur teknologi informasi berupa komputer, server, printer, dan jaringan yang mendukung operasional sistem. Komponen keenam adalah pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan, prosedur keamanan, otorisasi, dan pemisahan tugas untuk menjaga integritas serta kerahasiaan data akuntansi. Keenam komponen ini saling terintegrasi membentuk sistem informasi akuntansi yang efektif.

Flowchart dalam Sistem Informasi Akuntansi

Flowchart atau diagram alir merupakan representasi grafis dari alur proses bisnis yang menggambarkan langkah-langkah, keputusan, dan interaksi antar entitas dalam siklus akuntansi (Krismiaji, 2020). Tehupuring dan rekan-rekan (2023) menambahkan bahwa flowchart merepresentasikan algoritma atau instruksi berurutan dengan menggunakan garis penghubung antar simbol. Setiap simbol mewakili proses tertentu sehingga alur kerja dapat dipahami secara visual. Simbol-simbol yang digunakan mencakup terminal, input/output, proses, flowline, dokumen, manual input, decision, manual operation, connector,

predefined process, magnetik tape unit, dan offline storage (Putri, 2022). Dalam konteks sistem informasi akuntansi, flowchart membantu memvisualisasikan aliran data dari input hingga output sehingga memudahkan analisis dan perancangan sistem yang efisien.

Sistem Akuntansi Pengadaan

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019) menekankan bahwa pengadaan merupakan bagian integral dari siklus akuntansi yang melibatkan pencatatan transaksi mulai dari pemesanan barang atau jasa hingga pembayaran kepada pihak ketiga. Hery (2023) mendefinisikan sistem akuntansi pengadaan sebagai sistem yang mengatur seluruh kegiatan akuntansi terkait pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, pemesanan, penerimaan barang, hingga pembayaran. Soemarso dan Sri Mulyani (2018) menambahkan bahwa sistem ini memastikan transaksi pengadaan tercatat dengan baik sesuai prosedur berlaku sehingga pengadaan dilakukan secara efisien dan sesuai anggaran. Sistem akuntansi pengadaan juga meliputi kontrol terhadap stok barang serta pemantauan kewajiban pembayaran kepada vendor guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengelolaan kas.

EOS Teknologi (2020) mengidentifikasi fungsi-fungsi terkait pengadaan. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian berdasarkan posisi persediaan. Fungsi pembelian memilih pemasok dan memesan barang. Fungsi penerimaan barang memeriksa kesesuaian kualitas dan kuantitas. Fungsi akuntansi mencatat transaksi pembelian dan kewajiban yang timbul. Dokumen pendukung yang digunakan menurut Tjahjadi (2020) meliputi surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, memo debit, dan buku pembantu utang usaha. Wadiyo (2023) menggambarkan melalui flowchart bahwa proses pengadaan dimulai dari pemantauan posisi stok, pembuatan surat permintaan pembelian, pengiriman ke pemasok, hingga pencatatan penerimaan barang di gudang.

Sistem Akuntansi Pendistribusian

Zaki dan Suryani (2024) menjelaskan bahwa sistem akuntansi pendistribusian bertujuan mencatat, mengendalikan, dan melaporkan seluruh transaksi distribusi barang untuk menjaga keakuratan informasi persediaan dan biaya distribusi. Febriantoko (2024) menambahkan bahwa sistem ini mengorganisir data transaksi keuangan dan mengubahnya menjadi informasi berguna bagi pengambilan keputusan. Mardiasmo (2023) menguraikan fungsi-fungsi dalam sistem ini, meliputi fungsi pencatatan transaksi, fungsi pengendalian internal, fungsi pengelolaan persediaan secara real-time, fungsi

pelaporan keuangan, serta fungsi verifikasi dan penerimaan barang. Setiap fungsi saling mendukung untuk memastikan seluruh proses distribusi tercatat secara akurat dan terkontrol.

Dokumen dalam pendistribusian yang diuraikan Supriyono (2024) terdiri dari surat permintaan barang, surat jalan, faktur, bukti penerimaan barang, bukti pengeluaran barang, laporan pengiriman, dan laporan persediaan. Proses pendistribusian diawali oleh pelanggan yang mengisi formulir pengiriman, dilanjutkan dengan pembuatan resi pengiriman oleh admin dalam empat rangkap, penugasan driver untuk mengirim barang, hingga diterimanya barang oleh penerima yang dituju (Indra, 2020). Flowchart pendistribusian ini menggambarkan alur yang sistematis dan transparan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan fondasi penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan, mengelola risiko, serta memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Dwi Martani (2024) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai, meliputi keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Puspita dan rekan-rekan (2023) menambahkan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi mengevaluasi keandalan aktivitas organisasi dan mengidentifikasi potensi risiko guna memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan manajerial.

Munifah (2023) menguraikan kerangka kerja COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang terdiri dari lima komponen utama yang saling terkait. Komponen pertama adalah lingkungan pengendalian yang berfungsi sebagai fondasi sistem, mencakup integritas, nilai etika, kompetensi personel, filosofi manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan sumber daya manusia. Komponen kedua adalah penilaian risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi, kemudian menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Komponen ketiga berupa aktivitas pengendalian yang mencakup kebijakan dan prosedur pelaksanaan untuk memastikan arahan manajemen diterapkan dengan baik. Komponen keempat adalah informasi dan komunikasi yang mendukung identifikasi, penangkapan, dan pertukaran data internal yang diperlukan personel dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Komponen kelima adalah pemantauan yang menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu.

Kerangka COSO ini menjadi acuan utama dalam merancang dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Perum BULOG Sub Divre Baubau, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan logistik pangan nasional. Sub Divre Baubau dipilih karena perannya yang strategis dalam mengelola stok pangan serta menghadapi tantangan terkait gangguan cuaca, gagal panen, dan armada transportasi yang berdampak pada pencatatan sistem akuntansi pengadaan dan pendistribusian. Objek penelitian adalah sistem akuntansi pengadaan dan pendistribusian beras, mencakup prosedur, mekanisme, dan kebijakan pencatatan dari aktivitas pengadaan hingga pendistribusian ke konsumen akhir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sarosa (2017) mendefinisikan data kualitatif sebagai data berbentuk deskripsi verbal berupa kata-kata atau narasi yang menggambarkan fenomena sosial secara mendalam. Sulistyawati (2022) menambahkan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan analisis data deskriptif dengan menekankan konteks dan makna gejala yang diamati. Pendekatan ini dipilih agar peneliti menggali informasi secara holistik mengenai prosedur dan kendala pengadaan serta pendistribusian beras di lapangan.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Bungin (2020) menjelaskan bahwa data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara atau observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen perusahaan, arsip, dan literatur yang relevan. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan Kepala Sub Divre Baubau, Kepala Seksi Pelayanan Publik, Kepala Gudang, serta Staf Gudang. Teknik pengumpulan data juga melibatkan observasi langsung terhadap aktivitas operasional serta dokumentasi berupa catatan resmi dan laporan internal perusahaan.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda, termasuk wawancara dengan informan yang beragam, observasi lapangan, dan dokumen pendukung dari internal maupun eksternal organisasi (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data untuk memfokuskan informasi, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna memastikan validitas temuan. Definisi operasional variabel mencakup tiga aspek: sistem akuntansi yang terdiri dari prosedur pencatatan dan dokumentasi transaksi pengadaan serta

pendistribusian beras, pengadaan beras yang meliputi perencanaan kebutuhan hingga penerimaan barang, dan pendistribusian beras yang mencakup prosedur penyaluran dari gudang kepada pihak penerima sesuai ketentuan berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Sistem Akuntansi Pengadaan Beras Melalui Mitra Kerja Pengadaan

Perum BULOG melaksanakan pengadaan beras dalam negeri melalui kemitraan dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP). Mitra Kerja ini dapat berupa perusahaan penggilingan, koperasi, atau Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan BULOG. Penggunaan mitra kerja dalam pengadaan merupakan strategi strategis yang memungkinkan BULOG menjangkau sumber beras dari berbagai daerah penghasil padi. Prosedur pengadaan melalui Mitra Kerja dilakukan dengan beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis.

Tahap pertama, Mitra Kerja mengajukan permohonan pengadaan beras kepada Kasubdivre beserta informasi kuantitas dan jangka waktu pengadaan. Setelah Mitra Kerja dipilih, dibuatkan Kontrak Pengadaan antara BULOG dan Mitra Kerja sebagai dasar hukum kerja sama. Tahap kedua, Kasubdivre menentukan kuantitas, waktu, dan tempat pelaksanaan pengadaan. Bagian Operasional kemudian membuat dokumen Nota Dinas dengan melampirkan Surat Permintaan dan Surat Penawaran Harga (SPH). Tahap ketiga, Mitra Kerja membuat surat pernyataan berupa pakta integritas yang menyatakan bahwa beras yang diserahkan atau dimasukkan ke gudang BULOG telah memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Tahap keempat, Mitra Kerja menyerahkan beras ke gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK). PPK melakukan pemeriksaan langsung di depan pintu gudang BULOG sesuai standar kualitas yang berlaku. Tahap kelima, berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK, diterbitkan Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Nota Timbang, dan Rekap Penerimaan Barang sebagai dokumen resmi pencatatan. Tahap terakhir, Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas beras yang telah diterima dan masuk gudang BULOG.

Sistem Akuntansi Pendistribusian Beras Melalui Rumah Pangan Kita (RPK)

Distribusi beras dari Sub Divre BULOG Baubau ke wilayah sekitar menghadapi tantangan logistik yang bervariasi bergantung pada jarak dan

kondisi geografis. Distribusi dalam Kota Baubau tergolong paling efisien karena jarak antartitik pengantaran relatif dekat, yakni sekitar satu hingga lima kilometer dari gudang utama BULOG, dengan waktu tempuh dua puluh hingga tiga puluh menit melalui jalur darat yang cukup baik. Distribusi ke Kabupaten Buton Selatan, yang berjarak sekitar enam belas hingga dua puluh kilometer, juga berjalan relatif lancar dan dapat ditempuh dalam waktu satu hingga dua jam. Namun, distribusi ke Kabupaten Buton dan Buton Tengah memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Ke Kabupaten Buton, perjalanan menempuh jarak sekitar tiga puluh lima hingga empat puluh kilometer dan memakan waktu dua hingga tiga jam. Sementara distribusi ke Buton Tengah melibatkan perjalanan multimoda, yakni transportasi laut dari Baubau ke Pelabuhan Wamengkoli dilanjutkan jalur darat, dengan total waktu tempuh sekitar dua hingga empat jam. Distribusi ke Kabupaten Wakatobi menjadi yang paling kompleks karena sepenuhnya bergantung pada moda laut dengan waktu tempuh empat hingga enam jam. Faktor eksternal seperti infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai serta gangguan cuaca, terutama saat musim hujan, kerap memperlambat distribusi dan berdampak pada ketersediaan stok di outlet RPK.

Untuk memastikan beras sampai ke masyarakat secara efektif, BULOG menjalankan distribusi melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), yaitu outlet pangan milik masyarakat yang dibina secara resmi. Konsep RPK bertujuan memperpendek rantai distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan pokok, khususnya beras. Calon mitra mengajukan permohonan menjadi Mitra RPK dengan melampirkan persyaratan berupa fotokopi KTP, fotokopi NPWP, surat pengajuan resmi, dan bukti tempat usaha. BULOG melakukan verifikasi dan menyetujui kerja sama melalui penerbitan Kesepakatan Kemitraan. Mitra RPK mengajukan permintaan beras yang diverifikasi oleh Bagian Operasional. Selanjutnya Bagian Keuangan mengecek dan memverifikasi jumlah pembayaran. Setelah dikonfirmasi, Bagian Operasional menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) ke gudang. Gudang menerima SPPB sebagai otorisasi resmi dan menyiapkan beras sesuai isian dokumen. Beras dimuat ke kendaraan pengangkut, gudang menerbitkan Surat Out Gudang dan Surat Jalan, lalu barang dikirim kepada mitra RPK.

PEMBAHASAN

Analisis Sistem Akuntansi Pengadaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengadaan beras melalui Mitra Kerja di Perum BULOG Sub Divre Baubau telah berjalan secara sistematis dengan tahapan administratif yang jelas. Setiap tahap menghasilkan dokumen pendukung yang menjadi bukti pencatatan akuntansi. Romney dan Steinbart (2020) menegaskan bahwa dokumen transaksi merupakan komponen data

dalam sistem informasi akuntansi yang berfungsi sebagai input mentah untuk proses pengolahan informasi keuangan. Dalam konteks pengadaan BULOG, dokumen seperti Nota Dinas, SPH, LHPK, Nota Timbang, dan Rekap Penerimaan Barang merupakan bentuk konkret dari komponen data tersebut. Sementara itu, Tjahjadi (2020) menambahkan bahwa setiap dokumen pengadaan memiliki fungsi khusus dalam menjaga keutuhan alur pencatatan transaksi sehingga tidak ada data yang terlewatkan dari proses pengolahan informasi akuntansi.

Namun, ditemukan adanya tahapan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) secara manual oleh Mitra Kerja menambah waktu tunggu sebelum pencairan dana dilakukan. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019) menekankan bahwa sistem akuntansi pengadaan yang efektif harus mampu memastikan pencatatan transaksi berjalan efisien dari pemesanan hingga pembayaran. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar terbitnya Nota Timbang dan rekap penerimaan barang secara otomatis memicu penerbitan SPP oleh sistem akuntansi internal BULOG. Rekomendasi ini mengurangi waktu tunggu pembayaran, menghilangkan redundansi input data oleh pihak eksternal, dan mengefisienkan aliran kas menuju Mitra Kerja segera setelah barang dinyatakan memenuhi syarat.

Dari perspektif sistem pengendalian internal, rekomendasi ini mendukung dua komponen kerangka COSO. Pertama, Penilaian Risiko, di mana sistem baru mampu mengidentifikasi potensi risiko seperti kesalahan timbangan atau data palsu karena Nota Timbang yang tidak wajar otomatis terdeteksi sebelum SPP diterbitkan. Kedua, Informasi dan Komunikasi, di mana informasi Nota Timbang dan rekap barang disampaikan secara real-time ke unit operasional sehingga akurasi dan transparansi data meningkat (Munifah, 2023). Dengan demikian, pengendalian internal menjadi lebih efektif dan risiko kecurangan dapat diminimalisir dalam proses pengadaan beras.

Analisis Sistem Akuntansi Pendistribusian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendistribusian beras melalui RPK di Perum BULOG Sub Divre Baubau sudah terstruktur, mulai dari verifikasi administrasi calon mitra hingga pengiriman barang ke outlet. Zaki dan Suryani (2024) menyatakan bahwa sistem akuntansi pendistribusian bertujuan mencatat, mengendalikan, dan melaporkan seluruh transaksi distribusi barang untuk menjaga keakuratan informasi persediaan. Dokumen seperti SPPB, Surat Out Gudang, dan Surat Jalan berfungsi sebagai bukti pencatatan yang mengikuti alur distribusi secara transparan. Setiap dokumen mencatat informasi penting, mulai dari jenis barang, jumlah, hingga identitas penerima.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterlambatan distribusi akibat kondisi geografis dan cuaca. Ketika keterlambatan terjadi, tidak terdapat perubahan prosedur secara formal. Namun Sub Divre BULOG Baubau bersama mitra tetap melakukan penyesuaian teknis berupa koordinasi ulang jadwal distribusi, pengalihan rute, pemanfaatan moda transportasi alternatif, hingga penyampaian estimasi keterlambatan secara transparan kepada mitra. Febriantoko (2024) menegaskan bahwa sistem akuntansi distribusi harus mampu mengorganisir data transaksi keuangan dan mengubahnya menjadi informasi berguna bagi pengambilan keputusan. Penyesuaian teknis tersebut merupakan bentuk responsibilitas operasional yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam sistem akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya dokumentasi formal atas setiap penyesuaian agar dapat tercatat dalam sistem akuntansi sebagai data pendukung pengambilan keputusan manajerial.

Untuk meningkatkan efisiensi, direkomendasikan penggabungan proses permohonan mitra RPK dan pengajuan permintaan barang pada tahap awal. Saat verifikasi berkas selesai dan calon mitra dinyatakan layak, sistem langsung menerbitkan Purchase Order tanpa menunggu tahapan terpisah. Pendekatan ini menghilangkan duplikasi verifikasi dan mempercepat pengeluaran barang dari gudang. Dari aspek pengendalian internal, rekomendasi ini mendukung tiga komponen COSO. Penilaian Risiko terbantu karena risiko kesalahan input data dan duplikasi verifikasi diminimalkan. Informasi dan Komunikasi meningkat karena sistem terintegrasi memungkinkan aliran data yang lancar antara calon mitra dan petugas BULOG. Aktivitas Pengendalian menjadi lebih konsisten karena penggabungan proses memungkinkan penerapan kontrol yang efisien dan terstandarisasi (Puspita et al., 2023). Secara keseluruhan, kedua rekomendasi perbaikan alur tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi dan akurasi yang menjadi tujuan utama sistem akuntansi pengadaan dan pendistribusian dalam organisasi BULOG

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan terkait sistem akuntansi pengadaan dan pendistribusian beras di Perum BULOG Sub Divre Baubau. Pengadaan beras dilakukan melalui Mitra Kerja Pengadaan (MKP), yaitu perusahaan atau kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kualitas, dan teknis sesuai pedoman BULOG. Sistem ini memungkinkan penyerapan produk petani lokal secara efisien dan pengendalian mutu sebelum distribusi ke masyarakat. Setiap tahapan pengadaan menghasilkan dokumen

pendukung berupa kontrak, Nota Dinas, SPH, LHPK, Nota Timbang, dan Rekap Penerimaan Barang yang menjadi dasar pencatatan akuntansi. Alur pengadaan yang berlaku telah terstruktur secara sistematis namun masih mengandung tahapan manual yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, khususnya pada pengajuan surat permintaan pembayaran oleh Mitra Kerja.

Model rekomendasi yang diajukan menggantikan proses pengajuan SPP secara manual dengan otomatisasi berbasis dokumen fisik, sehingga cukup melalui satu kali verifikasi. Perubahan ini mempercepat pencairan dana, mengurangi birokrasi, dan tetap menjaga pengawasan audit secara efektif (Romney & Steinbart, 2020). Dari perspektif pengendalian internal, rekomendasi ini mendukung komponen penilaian risiko karena potensi kesalahan data dapat teridentifikasi sebelum pembayaran diproses.

Pendistribusian beras dilakukan melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang bertujuan memperpendek rantai distribusi dan menjaga stabilitas harga beras. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta gangguan cuaca yang memperlambat pengiriman ke mitra di wilayah terpencil. Model rekomendasi berupa penggabungan proses permohonan mitra dan pemesanan barang dalam satu langkah dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat penyaluran barang, dan memastikan ketepatan dokumentasi (Zaki & Suryani, 2024). Kedua rekomendasi tersebut secara keseluruhan mendukung komponen penilaian risiko serta informasi dan komunikasi dalam kerangka COSO sehingga pengendalian internal menjadi lebih efektif (Munifah, 2023).

Saran

Pertama, Bagian Operasional memegang peranan sentral dalam seluruh proses pengadaan dan pendistribusian. Disarankan agar dilakukan evaluasi pembagian tugas secara lebih proporsional antar subbagian guna mencegah terjadinya beban kerja yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi proses kerja secara keseluruhan. Evaluasi ini penting agar setiap pegawai dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing tanpa mengorbankan kualitas pencatatan akuntansi.

Kedua, untuk menunjang kelancaran proses pengadaan dan distribusi, perlu adanya penambahan personel yang kompeten di bagian operasional, terutama pada kantor Sub Divre yang memiliki cakupan wilayah kerja cukup luas. SDM tambahan ini dibutuhkan untuk mempercepat verifikasi dokumen, administrasi pencatatan, serta koordinasi dengan gudang dan mitra kerja. Tanpa penambahan tenaga kerja, risiko keterlambatan pencatatan dan penyaluran beras akan semakin besar.

Ketiga, disarankan untuk menambah fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Divre. SPI berfungsi melaksanakan pemeriksaan intern terhadap keuangan dan operasional perusahaan, menilai pengendalian internal yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala. Keberadaan SPI penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dan pendistribusian berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Sugiyono, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Adietya, M. R., Gayatri, S., & Mariyono, J. (2022). Satisfaction level of rice farmers toward partnership program with corporate logistics (Perum BULOG) in Semarang City, Indonesia. *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(2), 230–245.
- Dwi Martani. (2024). Implementasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1058. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1058>
- Efrita, E., Sjarkowi, F., Yazid, M., & Adriani, D. (2017). The role of the Bureau of Logistics (BULOG) in the adequacy of rice in Bengkulu Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 65(5), 116–126.
- EOS Teknologi. (2020). Fungsi-fungsi terkait dalam sistem akuntansi pengadaan.
- Febriantoko, J. (2024). Pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 84–96. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.711>
- Fitriyah, N., & Pertiwi, D. A. (2020). Analisis sistem informasi akuntansi penjualan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian intern (Studi pada Perum BULOG Sub Divre Kediri). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(2), 114–123.
- Geerts, G. L. (2011). A design science research methodology and its application to accounting information systems research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 12(2), 142–151.
- Herliana, S., Ratnaningtyas, S., Aina, Q., Zuraida, U., Sutardi, A., & Qorina, S. (2025). Comparison between food security in Indonesia and Thailand: Rice export and import. *Journal of the Community Development in Asia*, 8(1), 97–115.
- Hery. (2023). Akuntansi pengadaan: Teori dan praktik pengelolaan barang dan jasa. Grasindo.

- Hidayat, Y. (2019). Distribusi beras BULOG pasca bansos rastra dan bantuan pangan non tunai. *Jurnal Logistik Indonesia*, 2(2), 1–14.
- Hidayat, Y., & Evitha, Y. (2021). Effective and efficient food commodity distribution strategy at the Indonesia Logistics Bureau (BULOG). In *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information (ICSTIAM) 2019*. EAI.
- Indra. (2020). Sistem informasi pendistribusian barang. *Jurnal Informatika Medis Indonesia*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.35870/jimik.v1i1.8>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.
- Krismiaji. (2020). Sistem informasi akuntansi dan manajemen. UAD Press. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-61-2>
- Kusdi, N. (2013). Pengaruh sistem terhadap penyusunan strategi dan desain organisasi. Universitas Indonesia Press.
- Mardiasmo. (2023). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Mulyadi. (2021). *Akuntansi manajemen: Pendekatan kuantitatif* (6th ed.). Salemba Empat.
- Munifah, S. (2023). Evaluasi pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3350–3364. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1674>
- Pamudji, S. (1987). *Pengantar teori dan praktek akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- PPM School of Management. (2023). *Kepatuhan perpajakan: Strategi pencatatan dan pelaporan transaksi tepat waktu*. PPM.
- Puspita, S. P. A., Julian, L., & Sari, R. K. (2023). Evaluasi lingkungan pengendalian dengan kerangka pengendalian internal COSO. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3350–3364. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1674>
- Putri, R. A. (2022). Simbol-simbol flowchart dalam representasi proses bisnis. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 45–56.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting information systems* (15th ed.). Pearson Education.
- Sam, A. A. R., Idrus, M., & Afiah, N. (2023). Analisis pengelolaan persediaan pada beras BULOG (Studi kasus Perum BULOG Cabang Makassar). *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 6(2), 52–62.
- Simatupang, T. M. (1995). *Teori sistem dalam organisasi*. Universitas Indonesia.

- Sitinjak, D. A. (2020). Peran sistem akuntansi sebagai alat bantu manajemen pengendalian aktivitas perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 4(2). <https://doi.org/10.31294/jasika.v4i2.6104>
- Soemarso, & Sri Mulyani. (2018). *Sistem akuntansi pengadaan barang: Tinjauan pengendalian internal*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyono. (2024). Dokumen pendistribusian barang dalam sistem akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 23–38.
- Suryanto. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.51544/jma.v7i1.2550>
- Tehupuring, M. R., Sibarani, M. C. S., & Pasaribu, T. (2023). Diagram alir sebagai representasi algoritma dan langkah-langkah instruksi dalam sistem. *Jurnal Mathematic Paedagogic*, 5(2), 1977. <https://doi.org/10.36294/jmp.v5i2.1977>
- Tjahjadi, A. E. (2020). Analisis pengaruh proses perencanaan anggaran dan administrasi pengadaan barang/jasa. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4248>
- Wadiyo, A. (2023). Sistem pembelian dan penerimaan barang. *JARUM: Journal of Analysis Research and Management Review*, 1(3), 46. <https://doi.org/10.62952/jarum.v1i3.46>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). *Accounting* (25th ed.). Cengage Learning.
- Zaki, M. A., & Suryani, R. (2024). Analisis pengendalian persediaan sistem manajemen persediaan. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 4(2), 977. <https://doi.org/10.30656/intech.v4i2.977>